

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan daerah yang secara etnis relatif homogen, meskipun secara sosiologis terpecah ke dalam berbagai kelompok sosial dan aliran politik yang berbeda.¹ Pada tahun 1950-an Sumatera Barat termasuk ke dalam daerah Keresidenan Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera, Riau, Jambi. Akan tetapi setelah keluar Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, maka Sumatera, Riau dan Jambi tersebut kemudian berubah nama menjadi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Peraturan tersebut melahirkan pembentukan daerah administratif di Sumatera Barat sehingga terbagi menjadi beberapa Kabupaten. Selain itu daerah juga memiliki 2 buah Kota Besar yakni Padang dan Bukittinggi.² Tujuan dari perubahan tersebut dapat mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan daerah yang lainnya.

Pada awal 1950-an pemerintah pusat melakukan tindakan yang tidak wajar terhadap institusi sipil dan militer Sumatera Barat, tindakan tersebut berupa pengurangan bataliyon-bataliyon brigade kemiliteran. Hal ini membuat para militer tersebut merasa dikhianati oleh pemerintah dengan dipulangkan para anggotanya ke daerah masing-masing. Para anggota bataliyon ini merasa

¹Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 19.

²Gusti Asnan, *Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 135-137.

dikhianati pemerintah dan menganggap kesetiaan yang mereka tunjukkan selama masa perjuangan kemerdekaan tidak dihargai. Pada saat yang bersamaan pemerintah gagal melakukan tindakan yang efektif untuk melanjutkan pengembangan pembangunan ekonomi daerah luar Jawa, serta pemerintah pusat lebih memusatkan perhatian terhadap pembangunan di Pulau Jawa ketimbang daerah.³

Pada masa Gubernur Ruslan Muljohardjo, beliau menjadi pembela kepentingan daerah Sumatera Barat menghadapi pusat, memprotes khususnya dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang tidak cukup untuk menjalankan roda pemerintahan serta memulai rehabilitasi dan pengembangan ekonomi.⁴ Perasaan dikhianati yang merasuki masyarakat Minangkabau khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, juga dirasakan dalam bidang militer. Dengan berbagai cara, bekas komando militer Sumatera Barat, ex Divisi Banteng, menunjukkan ketidaksenangan dan rasa ketidakadilan yang berkembang di Sumatera Barat.⁵

Ex Divisi Banteng merupakan divisi TNI yang memegang peranan penting pada masa perang kemerdekaan di Sumatera Tengah. Divisi ini dipimpin oleh Ismail Lengah. Divisi ini bertanggungjawab dalam mempertahankan wilayah Sumatera Barat dan Riau. Divisi ini aktif pada masa kependudukan Belanda di Indonesia sehingga kaum kolonial tersebut tidak berhasil membuat wilayah

³Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 266.

⁴*Ibid*, hlm. 269.

⁵*Ibid*, hlm. 272-273.

bagian. Akan tetapi pada tahun 1952, ex Divisi Banteng dibubarkan karena terjadinya pengurangan-pengurangan di kesatuan Brigade. Hal ini disebabkan pemerintah pusat khawatir akan terjadinya pertentangan tentang masalah politik antara pemerintah pusat dan belanda.⁶

Ex Divisi Banteng yang menjadi faktor pendorong konsolidasi yang mempengaruhi Sumatera Barat untuk melawan Jakarta, sehubungan dengan masalah otonomi daerah, yang memberikan kemungkinan jalan keluar dari jalan buntu diantara daerah dan pusat.⁷

Pada tanggal 25 November 1956 diadakan pertemuan reuni ex Divisi Banteng di kota Padang. Dalam pertemuan tersebut antara lain diputuskan, bahwa untuk memenuhi usaha pembangunan daerah akan dilakukan dengan cara menggali seluruh potensi daerah dengan kemampuan dan kekayaan daerah berdasarkan otonomi seluas-luasnya. Masalah-masalah lain juga telah menjadi keputusan rapat reuni ex Divisi Banteng pada waktu itu antara lain, dalam bidang sosial dan ekonomi daerah. Pertemuan reuni untuk menghendaki dihapuskan sistim sentralisasi yang pada kenyataannya menimbulkan birokrasi yang kurang sehat. Keadaan demikian menghilangkan inisiatif daerah khususnya dalam bidang pembangunan perekonomian untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dalam pertemuan tersebut juga sekaligus dibentuk divisi Dewan Banteng, divisi ini diketuai oleh Letkol Ahmad Husein sebagai ketua Dewan Banteng. Dalam pertemuan ex Divisi banteng tersebut terdapat beberapa keputusan diantaranya,

⁶Leirissa, *PRRI Permesta* (Jakarta: pustaka Utama, 1991), hlm. 34-35.

⁷ Audrey Kahin, *op.,cit.* hlm. 272-273.

mengusahakan pembangunan Sumatera Tengah yang selama ini terabaikan baik dari segi ekonomi maupun sosial, perencanaan penyusunan sejarah perjuangan Sumatera Tengah baik dari segi pembangunan Museum Perjuangan, masalah status Veteran, persoalan panji, masalah janda dan yatim piatu dan kemudian persoalan makam pahlawan. Semua persoalan tersebut pelaksanaanya di bawah pengawasan ex Divisi Banteng daerah Sumatera Tengah.⁸

Struktur kepengurusan Dewan Banteng yang ditunjuk oleh peserta reuni kemiliteran:

Tabel I. Nama-nama Anggota Dewan Banteng yang ditunjuk Peserta Reuni kemiliteran.



No	Nama Anggota Dewan Banteng	Jabatan
1	Letkol Ahmad Husein (Ketua)	Komandan Resimen Infentari 4
2	Kaharuddin Datuak Rangkyo Basa	Kepala Polisi Provinsi Sumatera Tengah
3	Syeh Ibrahim Musa Parabek	Wakil Asisten II staf Umum Angkatan Darat (SUAD)
4	Mayor Syuib	Wakil Asisten II staf Umum Angkatan Darat (SUAD)
5	H. Darwis Taram Dt. Tumenggung	Bupati
6	Mayor Anwar Umar	Kepala Staf Resimen Infentari 1

⁸Makmum Salim, *Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-Permesta* (Departemen Pertahanan-Kemampuan Pusat Sejarah ABRI, 1971), hlm. 2-4.

7	St. Soeis	Kepala Polisi Kota Padang
8	Soelaeman	Kepala BRN Sumatera Tengah
9	Hasan Basri	Ex Komandan Resimen 4 Divisi Banteng
10	Kapten Nurmantias	Komandan Bataliyon Infentasi 140
11	A. Abdul Manaf	Bupati Kabupaten Merangin Jambi
12	Saidina Ali	Kepla Jawatan Sosial Kabupaten Kampar
13	Dt. Simaradjo	Niniak Mamak
14	Kapten Jusuf Nur	Direktorat Kehakiman AD
15	Letnan Satu Sebastian	Perwira KDM (Komando Distrik Militer) 20 Indragiri
16	Ali Luis	Bupati Gubernur Sumatera Tengah
17	Ismail Lengah	Kolonel Pensiun

Tabel diatas menjelaskan nama-nama keanggotaan Dewan Banteng pada tahun 1956 yang telah ditunjuk oleh peserta reuni kemiliteran pada saat pertemuan yang diadakan di kota Padang tanggal 21-24 November 1956.

Dari hasil pertemuan antara ex reuni Divisi Banteng memutuskan untuk melaporkan kepada pemerintah pusat dengan mengutus beberapa delegasi dari Sumatera Tengah, yakni Dewan Banteng, namun delegasi tersebut gagal menemui Presiden yang disebabkan beberapa hal yang tidak memungkinkan. Namun timbal balik dari keputusan rapat yang diadakan ex reuni Divisi Banteng tersebut membuat Ahmad Husein mengambil keputusan dengan cara mengambil alih

pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 1956 di kantor Gubernur Padang. Adapun pendapat yang disampaikan oleh Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatera Tengah. Hal ini diakui secara terus terang oleh Gubernur Ruslan Muljohardjo. Pada waktu itu hasrat rakyat Sumatera Tengah yang disalurkan melalui Dewan Banteng mengenai masalah otonomi daerah, dapat dipahami oleh pemerintah. Akan tetapi pemerintah pusat kemudian menjadi tercengang dengan tindakan Dewan Banteng yang berlebihan dalam mengambilalih kekuasaan pemerintah di Sumatera Tengah.⁹

Usai pengambilalihan kekuasaan pemerintah Sumatera Tengah oleh Ahmad Husein menimbulkan situasi yang menegangkan antara Pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pusat dengan daerah telah putus, jaringan komunikasi Jakarta dengan Padang tidak dapat terhubung, sehingga hal ini membuat tidak ada berita apapun yang terdengar dari Padang. Kekhawatiran pusat dengan situasi yang sedang terjadi di daerah membuat Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) tidak bisa menjamin keselamatan apabila melakukan penerbangan ke Padang, padahal pusat membutuhkan Kabar tentang situasi yang terjadi di daerah. Situasi ini terpecahkan dengan pulangnya Kepala Kepolisian Sumatera Tengah ke Padang sehingga keadaan di daerah dapat dikabarkan ke Jakarta.¹⁰

⁹*Ibid*, hlm. 4.

¹⁰Chaniago, Khairul Jasmi. *Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkyo Basa Gubernur di Tengah Pergolakan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 231.

Seiring dengan berjalannya kekuasaan Dewan Banteng di Sumatera Tengah, kesulitan kemudian datang menghampiri, hal ini disebabkan tidak banyak bantuan dari Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan ekonomi maupun sosial di daerah. Pada tanggal 10 Februari 1958, pemerintah Dewan Banteng memberikan ultimatum yang berisikan beberapa poin penting kepada pemerintah pusat 5 x 24 jam apabila tidak dipenuhi maka daerah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat, pada saat itu juga Ahmad husein langsung mengadakan rapat di Sungai Dareh untuk mengumumkan PRRI tanggal 15 Februari 1958 dan menyatakan bahwa daerah memutuskan hubungannya dengan pemerintah pusat.

Pada tanggal 17 April 1958, pemerintah pusat langsung bertindak menggunakan kapal perang Gajah Mada, APRI menyerang Kota Padang. Pada saat itu juga kota dapat diduduki. Dalam waktu yang relatif singkat, seluruh kota penting di Sumatera Barat, seperti Padangpanjang, Bukittinggi, Solok, dan Payakumbuh dikuasai APRI.¹¹ Kekalahan PRRI lebih disebabkan tidak kuat melawan tentara APRI di kota-kota tersebut. Hampir semua kota-kota yang dibebaskan APRI dari PRRI penduduknya mengungsi ke daerah-daerah, karena merasa tidak aman oleh adanya perang.¹²

Setelah APRI masuk, Kota Padang selama operasi pemulihan keamanan sebahagian besar wargakota masih banyak mengungsi ke luar kota.¹³ Sebelumnya

¹¹ Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 177.

¹² *Arsip Pemerintah Daerah Kota Padang*, "Laporan Bhagian Politik Kotapradja Padang Bulan Djuni 1958", hlm. 7.

¹³ *Ibid*

wargakota Padang, Walikota, dan anggota-anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Padang) telah meninggalkan kota.¹⁴ Beberapa hari sebelum jatuhnya kota Padang, Husein bahkan telah mengeluarkan perintah agar para Pegawai Pemerintahan dan guru-guru meninggalkan kota-kota besar.¹⁵ Kondisi seperti ini membuat pemerintahan kota Padang dan dinas-dinas lain pada umumnya tidak berjalan lagi. Kevakuman kegiatan pemerintah daerah kota menyebabkan dinas-dinas banyak yang kosong, serta tidak ada petugas. Kondisi tersebut berlangsung sampai akhir tahun 1958.

Berhubung dengan kekosongan kursi pemerintahan maka penguasa perang di Sumatera Barat perlu memulihkan keamanan dan penyusunan kembali lembaga pemerintahan.¹⁶ Pihak penguasa perang Operasi 17 Agustus dan bekerja sama dengan rakyat meminta kembali menormalisasi pemerintah kota.¹⁷ Pada akhir 1958, kehidupan masyarakat dan pemerintahan kembali berjalan seperti biasa, meskipun belum normal seperti sebelum PRRI. Secara garis besar persoalan utama dari penelitian ini adalah bagaimana kondisi kota Padang pada masa PRRI dan usaha-usaha untuk memulihkan kembali pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota. Oleh karena itu penelitian ini penulis beri judul ***“Kota Padang pada masa PRRI tahun 1958-1961”***.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

¹⁴ *Ibid*

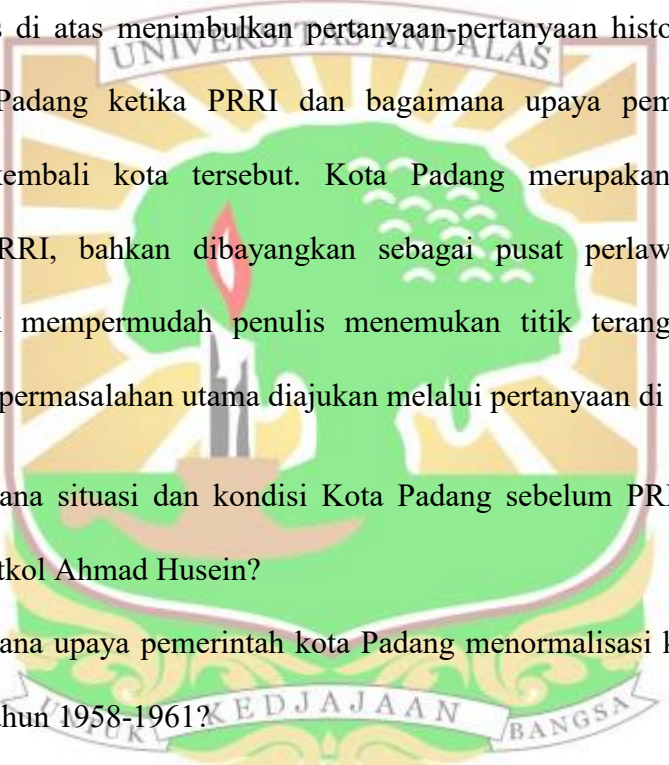
¹⁵ Mestika Zed, Hasril chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein* (Jakarta: PT Multanazam Mitra Prima, 2001), hlm. 315.

¹⁶ Arsip Pemerintah Daerah Kota Padang, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

Fokus penelitian ini adalah mengenai usaha-usaha pemerintah dalam memulihkan kembali kota Padang. Padang adalah satu kota besar di Sumatera Barat. Pada masa PRRI masyarakat kota Padang merasakan langsung dampak dari peristiwa tersebut. Masyarakatnya merasa ketakutan sehingga seluruh aspek kehidupan di kota Padang lumpuh, seperti kegiatan ekonomi, sosial maupun yang lainnya.

Realitas di atas menimbulkan pertanyaan-pertanyaan historis, bagaimana kondisi kota Padang ketika PRRI dan bagaimana upaya pemerintah dalam memulihkan kembali kota tersebut. Kota Padang merupakan tempat awal diumumkan PRRI, bahkan dibayangkan sebagai pusat perlawanan terhadap Jakarta. Untuk mempermudah penulis menemukan titik terang dari masalah tersebut, maka permasalahan utama diajukan melalui pertanyaan di bawah ini.

- 
1. Bagaimana situasi dan kondisi Kota Padang sebelum PRRI diumumkan oleh Letkol Ahmad Husein?
 2. Bagaimana upaya pemerintah kota Padang menormalisasi kota pada masa PRRI tahun 1958-1961?
 3. Bagaimana upaya pemerintah kota dalam mereorganisasi pembangunan kota pasca kembalinya pengungsi?

Batasan awal dari penelitian ini adalah 1958. Tahun ini merupakan awal diumumkan PRRI di Kota Padang. Batasan akhir yang diambil dari penelitian ini adalah 1961. Pada 1961 presiden Soekarno memberikan amnesti atau pengampunan terhadap para pengikut PRRI. Selain itu pasca keluarnya keputusan

presiden tentang amnesti tersebut, Indonesia memasuki periode sejarah baru, yakni era Demokrasi dipimpin atau Orde Lama. Seiring perubahan itu, dalam masa pemulihan keadaan pemerintah kota Padang dalam melakukan penstabilan terhadap reorganisasi pembangunan kota, baik secara fisik maupun non fisik. Batasan spasial penelitian ini adalah kota Padang, peneliti hanya ingin memfokuskan kondisi masyarakat kota Padang. Padang menjadi menarik sebagai lokus penelitian karena kota ini merupakan awal diumumkan PRRI, dan wargakota merasakan langsung dampak dari kemunculan dan kehancuran pemberontakan tersebut, serta terjadinya transisi di dalam pemerintahan Sumatera Barat.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

C.1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Memahami dan menjelaskan situasi dan kondisi Kota Padang sebelum PRRI diumumkan oleh Letkol Ahmad Husein.
2. Memahami dan menjelaskan upaya pemerintah kota Padang dalam menormalisasi kota pada masa pemberontakan PRRI tahun 1958-1961.
3. Memahami dan menjelaskan situasi upaya pemerintah kota dalam melakukan reorganisasi pembangunan kota pasca kembalinya pengungsi.

C.2. Manfaat

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini, dari segi teoritis adalah memberikan sumbangan dan konstribusi untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan sejarah khususnya di bidang sejarah Pemerintahan yang bersangkutan paut dengan kondisi kota Padang pada masa pergolakan tahun 1958-1961. Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi pedoman bagi pemerintah dan pejabat dalam mengeluarkan kebijakan dalam mereorganisasi kota di tengah situasi sulit. Bermanfaat juga bagi pemerintah untuk melihat bagaimana perubahan kondisi kota Padang yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun. Dari reorganisasi yang dilakukan tersebut bisa membawa perubahan kepada seluruh aspek kehidupan, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap kemajuan kota Padang di masa akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai PRRI bukanlah penelitian ataupun penulisan pertama. Ada banyak penelitian sejarah yang dilakukan oleh peneliti sejarah sebelumnya. Penelitian-penelitian itu menekankan pada posisi PRRI sebagai usaha pemberontakan, pergolakan, dan pengkhianatan. Kajian itu diantaranya, R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*.¹⁸ Buku ini sesungguhnya berusaha menjelaskan proses berjalannya peristiwa PRRI Permesta. Kajian ini berbicara mengenai pandangan para eksponen PRRI-Permesta, mulai dari awal muncul berbagai dewan-dewan daerah sampai kepada

¹⁸Leirissa, *PRRI Permesta* (Jakarta: pustaka Utama, 1991).

penyusunan strategi bersama di Palembang (Piagam Palembang) menjelang Musyawarah Nasional di Jakarta.

Mestika Zed, Hasril Chaniago, *Perlawanan Seorang Pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein*.¹⁹ Buku ini membahas tentang keterlibatan Ahmad Husein sebagai seorang yang berpengaruh terhadap pergolakan PRRI. Buku ini menggambarkan tentang kondisi kota Padang pada awal pemberontakan, kota Padang merupakan tempat diumumkannya PRRI dan kemudian kota Padang dijadikan sebagai tempat penyerangan awal tentara pusat dengan daerah.

Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*.²⁰ Buku ini membahas tentang perubahan kultural orang Minangkabau. Di Dalam buku ini diceritakan bahwa kota Padang merupakan kantor pusat pemerintahan Dewan Banteng dan juga sekaligus sebagai kantor ketua daerah.

Gusti Asnan, *PRRI, Penulisan sejarah dan kekerasan*.²¹ Karya ini merupakan pemetaan terhadap historiografi tentang PRRI. Gusti Asnan dalam buku ini membagi-bagi periodisasi penulisan, para pengarangnya dan karya-karya sejarah tentang PRRI. Karya ini lebih banyak menekankan sebagai sebuah kajian bibliografi sejarah PRRI.

¹⁹ Mestika Zed, Hasril Chaniago, *Perlawanan seorang pejuang: Biografi Kolonel Ahmad Husein* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

²⁰ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

²¹ Gusti Asnan, PRRI, "Penulisan Sejarah dan Kekerasan", *Jurnal Sejarah*. Tahun 2007. No.13.

Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatera Barat Indonesia 1926-1998*.²² Dalam buku ini menjelaskan tentang kota Padang sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mendukung Dewan Banteng dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Barat. Buku ini menggambarkan tentang semangat dan usaha orang Sumatera Barat mendukung Dewan Banteng di kota Padang untuk menciptakan keadilan yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat terhadap rakyat Sumatera Barat. Kota Padang merupakan sebuah kota yang menjadi titik tolak pemerintah pusat terhadap peristiwa PRRI.

Dari studi-studi yang ada di atas, telah banyak penelitian tentang PRRI, yang umumnya dari karya-karya di atas menjelaskan kota Padang sebagai tempat diumumkannya PRRI dan Padang juga di cap sebagai tempat orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Dalam karya di atas belum ada yang mengkaji tentang kota Padang pada masa PRRI 1958-1961 secara khusus. Adapun yang membahas hanya bagian umum tidak secara khusus. Penulisan ini bisa menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian terdahulu.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini didekati dengan pendekatan sejarah sosial dan sejarah kota. Ada beberapa konsep yang perlu diuraikan dalam penelitian ini. Sejarah sosial adalah sejarah yang mengkaji tentang proses hubungan timbal balik antara satu

²² Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

masyarakat dengan masyarakat lain, serta terdapat berbagai aspek kehidupan, diantaranya aspek sosial dan ekonomi.²³

Pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.²⁴ Menurut UU fungsi pemerintah adalah berfungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan melindungi.²⁵ Kota secara sosial adalah kota yang dilihat dari beberapa karakteristik perkotaan. *Pertama*, aspek fisik kota adalah kota yang dilihat dari segi struktur bangunan kota, kondisi geografis kota. *Kedua*, aspek sosial kota adalah kota yang dilihat dari perkembangan penduduk kota, yang awalnya hanya suatu komoditas kemudian meningkat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di dalam kota. *Ketiga*, aspek ekonomi kota adalah kota yang memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan dan keberlangsungan hidup di kota itu sendiri.²⁶

Kota dilihat dari aspek Pertumbuhan dan perkembangan pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu

²³ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Pendekatan Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 50.

²⁴ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 9-10.

²⁵ *Ibid*, hlm. 11.

²⁶ Freek Colombijn. *Paco-Paco Kota Padang: Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke- 20 dan Penggunaan Ruang Kota* (Yogyakarta: Ombak, 2000), hlm. 5.

pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut.²⁷

Kota darurat adalah kota yang memasuki dakade perubahan yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan di perkotaan, perubahan tersebut berdampak kepada berbagai aspek seperti, sosial, ekonomi, pemerintah. Hal ini disebabkan oleh konflik yang tengah terjadi antara pihak-pihak penguasa dan rakyat daerah.²⁸

Menurut Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan pada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Reorganisasi pembangunan adalah suatu perubahan fisik, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial guna untuk meningkatkan standar hidup seluruh anggota masyarakat, baik secara material maupun non material. Proses perubahan kehidupan tergantung kepada strategi, tindakan yang diambil dalam mengelola pembangunan. Segala perubahan yang terjadi saling berkaitan dan saling mempengaruhi, oleh sebab itu tergantung bagaimana masyarakat dalam menentukan hasil dari proses perubahan tersebut. Reorganisasi pembangunan bertujuan untuk mendukung segala aspek kehidupan masyarakat baik itu dari segi

²⁷ Dewi Sawitri, "Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota". *Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengembangan Lokal*. Vol.17. No.1. April 2006.

²⁸ Yohannes Nugroho, *Surabaya 1945: Sakral Tanahku* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016).

ekonomi maupun sosial dan politik di suatu daerah tertentu.²⁹ Begitu juga halnya dengan yang terjadi di kota Padang, Reorganisasi pembangunan yang dilaksanakan dalam masa pergolakan sama hal dengan membangkitkan semangat Wargakota yang sedang mengalami keterpurukan. Bangkit dari fenomena keterpurukan merupakan bukan sesuatu hal yang mudah, hal ini terjadi disebabkan oleh tekanan mental, kekhawatiran, ketakutan. Wargakota merupakan orang-orang yang bertempat tinggal dan hidup di kota dan melakukan aktifitas.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³⁰ Tahap pertama penelitian ini adalah heuristik, yaitu tahap pengumpulan data. Salah satu cara yang digunakan adalah melakukan studi pusaka ke berbagai perpustakaan seperti, Kantor Arsip Kota Padang, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Melalui pengumpulan data di berbagai perpustakaan itu diharapkan akan didapatkan bahan berupa sumber sekunder untuk mendukung penulisan tersebut seperti buku-buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan sebagainya. Untuk mendukung pengumpulan data akan dilakukan wawancara sebagai penguat data penelitian. Wawancara akan dilakukan ke orang-orang yang

²⁹ Mestika Zed. dkk, *Perubahan sosial di Minangkabau: Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat* (Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas Padang, 1992), hlm. 86.

³⁰ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1986), hlm. 32.

pernah merasakan kehidupan awal kota Padang pada masa PRRI, misalnya pedagang toko pada masa PRRI, PNS pada masa PRRI, anak sekolah pada masa PRRI, pegawai pemerintahan dan masyarakat yang tinggal di kota Padang masa itu. Data-data itu akan dipetakan dan diklasifikasikan berdasarkan data primer seperti arsip, dokumen-dokumen dan sebagainya, kemudian data sekunder seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan yang ada kaitannya dengan usaha pemerintah untuk mereorganisasi kembali kota Padang pada masa PRRI.

Tahap kedua penelitian ini adalah kritik. Ada dua bentuk kritik sumber, *pertama*, kritik intern untuk melihat kebenaran sumber, *kedua*, kritik ekstern untuk melihat apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak. Tahap ini bertujuan untuk melihat otentitas dan kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data tersebut benar atau tidak dan apakah data tersebut bisa dipercaya atau tidak. Untuk membuktikan semua itu maka diperlukan sumber lain sebagai perbandingan.

Tahap ketiga dari penelitian ini adalah interpretasi. Tahap ini adalah tahap pemahaman terhadap data atau sumber. Tahap ini bertujuan untuk melihat apakah sumber tersebut dapat dipahami dan bisa dijadikan sebagai pedoman penjelasan fakta sejarah yang valid tentang usaha-usaha pemerintah untuk menormalisasi kembali kota Padang pada masa PRRI, sehingga dapat menimbulkan imajinasi dalam penulisan nantinya. Imajinasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk historiografi, yaitu tahap akhir dalam metode sejarah. Pada tahap ini, akan dilakukan penulisan tentang kota Padang pada masa PRRI (1958-1961).

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menekankan pada “Usaha-usaha pemerintah dalam menormalisasi kembali kota Padang pada tahun (1958-1961)” terdiri dari empat bab yang antara satu bab dengan bab berikutnya saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Untuk memperjelas apa yang akan diungkapkan maka penulisan ini dibagi atas beberapa pokok, antara lain:

Bab I ini merupakan bab pengantar pentingnya penelitian dilakukan. Bab ini berisi latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka analisi, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang latar belakang permasalahan yang dikaji dan sekaligus dilengkapi dengan berbagai konsep dan metode sejarah. Bab ini sangat penting dalam sebuah karya ilmiah, karena bersifat sebagai panduan pokok dalam menfokuskan pembahasan dan mencari titik terang dari permasalahan yang dikaji.

Bab II merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang keadaan kota Padang sebelum PRRI diumumkan. Pentingnya bab ini dituliskan guna untuk mengetahui keadaan kota Padang baik dari segi sosial, ekonomi, dan pemerintahan kota sebelum pergolakan terjadi. Selanjutnya juga dijelaskan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Padang sebelum terjadinya pergolakan tersebut.

Bab III, berisikan tentang gambaran keadaan kota Padang pada awal di umulkannya PRRI. Bab ini menjadi penting karena didalamnya menjelaskan tentang kondisi kota Padang pada awal pergolakan, baik dari segi sosial maupun

ekonomi, kemudian upaya pemerintah dalam memulihkan kembali kota Padang pada masa pergolakan tersebut. Pada bab ini juga membahas tentang kota Padang pasca kembalinya pengungsi ke kota Padang. Pada bab ini juga terdapat penjelasan pengampunan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya masyarakat kota Padang yang terlibat dalam pergolakan, kemudian upaya yang dilakukan pemerintah dalam mereorganisasi pembangunan kota Padang pasca kembalinya pengungsi. Dengan begitu bab ini penting adanya untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam mereorganisasi kembali kota Padang pasca Perang.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari semua pertanyaan yang sebelumnya diajukan dalam tulisan ini. Pada bab ini merupakan bagian yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah di bahas.

